



JURNAL EKSOPODA

Journal of Interdisipliner

Vol. 01 No. 1 Tahun 2025

ISSN Media Elektronik: 3047888x

STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL



A. Fadel Muhammad

Pascasarjana Manajemen STIM Lasharan Jaya Makassar, Indonesia

Nurjannah Sanre

Pascasarjana Manajemen STIM Lasharan Jaya Makassar, Indonesia

Andi Wina Nasyrahbila

Pascasarjana Manajemen STIM Lasharan Jaya Makassar, Indonesia

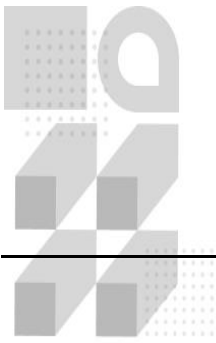
andiwina28@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis literatur dan wawancara dengan pakar ekonomi, penelitian ini mengeksplorasi berbagai langkah yang telah dan dapat diambil oleh Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Fokus utama penelitian meliputi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk ekspor, optimalisasi teknologi, serta reformasi kebijakan perdagangan dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui implementasi kebijakan seperti penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas infrastruktur logistik, dan perjanjian dagang internasional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, termasuk kurangnya inovasi, hambatan regulasi, dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong diversifikasi produk, adopsi teknologi tinggi, serta promosi produk unggulan di pasar global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan merupakan kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi studi kasus sektor tertentu yang berpotensi menjadi motor penggerak ekspor, seperti manufaktur, teknologi digital, dan produk berbasis kreatif.

Kata kunci: Daya Saing, Perdagangan Global, Pasar Internasional





A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, strategi Indonesia dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional menjadi sangat krusial. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di pasar global. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar, seperti persaingan dari negara-negara lain yang semakin ketat dan perubahan tren pasar yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif untuk mengoptimalkan daya saing produk Indonesia, baik melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, maupun strategi pemasaran yang efektif (Hermawan dkk, 2022; Rahmah & Ibrahim, 2023). Dalam konteks ini, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti kakao, jahe, dan produk halal menjadi fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi ekspor Indonesia di pasar internasional (Nurjati, 2022; Izzatin dkk, 2023; Qoniah, 2022). Melalui kebijakan yang mendukung dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, Indonesia dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar global.

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut World Bank, infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting bagi aktivitas ekonomi seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, dan distribusi. Kurniawan dan Ihsan (2021) menekankan bahwa dengan infrastruktur yang baik, negara dapat meningkatkan efisiensi logistik, menarik investasi, memperluas konektivitas antarwilayah, dan mendorong daya saing ekonomi di pasar global. Sebagai salah satu negara berkembang dengan tantangan geografis yang kompleks, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi makro. Indonesia telah meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Tol Laut, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur. Proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, pelabuhan Patimban, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Namun, meskipun beberapa proyek berhasil meningkatkan konektivitas, ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah masih menjadi masalah utama.

Menurut Farhan dan Sugianto (2022) ketimpangan ini terlihat dari kontribusi ekonomi yang tidak merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses dan



kualitas infrastruktur yang berdampak pada distribusi ekonomi nasional. Selain ketimpangan, tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur meliputi keterbatasan pendanaan dan hambatan regulasi, seperti proses pembebasan lahan yang lambat. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah telah menggandeng sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) (Rashed et al, 2017). Namun, implementasi skema ini masih memerlukan perbaikan untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini akan mengeksplorasi dampak positif infrastruktur terhadap perekonomian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan infrastruktur yang efektif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai data sekunder dari sumber yang kredibel guna memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis hubungan antara pembangunan infrastruktur dan indikator ekonomi makro, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, efisiensi logistik, dan distribusi ekonomi wilayah. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari data sekunder, seperti laporan pemerintah Indonesia (Kementerian PUPR, BPS, BKPM), publikasi internasional (World Bank, IMF, World Economic Forum), dan artikel jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada database daring seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal pemerintah untuk mendapatkan jurnal, laporan, serta dokumen resmi. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, fokus pada pembangunan infrastruktur, dan berasal dari sumber terpercaya yang terkini (5-10 tahun terakhir). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi berdasarkan tema utama, seperti kontribusi infrastruktur terhadap PDB, investasi, dan pemerataan wilayah. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data untuk mengidentifikasi tema utama (efisiensi logistik, produktivitas), kategorisasi tema ke dalam dampak langsung dan tidak langsung, serta interpretasi data yang menghubungkan temuan dengan teori-teori ekonomi makro dan praktik pembangunan infrastruktur.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari laporan pemerintah, publikasi internasional, dan artikel ilmiah untuk memastikan konsistensi informasi. Cross-referencing juga digunakan untuk menguji akurasi temuan. Hasil analisis ini diharapkan

memberikan wawasan tentang peran strategis infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pendekatan studi literatur ini memungkinkan penelitian dilakukan secara komprehensif, menggunakan data yang tersedia untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana infrastruktur dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia.

C. Pembahasan

Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas energi, memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas nasional. Menurut World Bank (2021), investasi di sektor infrastruktur dapat menciptakan efisiensi logistik yang lebih baik, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Hal ini pada akhirnya meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Di Indonesia, proyek infrastruktur besar seperti jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra telah memberikan dampak positif terhadap konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini tidak hanya mendukung distribusi barang tetapi juga memperkuat hubungan antara pusat-pusat produksi dan pasar. Studi dari Bappenas menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur sebesar 1% dari PDB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi langsung infrastruktur terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, infrastruktur energi, seperti pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi, mendukung kelancaran aktivitas bisnis dan industri. Peningkatan ketersediaan energi menjadi faktor penting dalam menarik investor asing yang membutuhkan pasokan energi stabil untuk operasional mereka (Kim dkk, 2017). Sebagai contoh, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengatasi defisit listrik di berbagai wilayah, sehingga mendukung pengembangan industri di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau. Namun, meskipun manfaat infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sangat jelas, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Infrastruktur yang ada saat ini cenderung terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku masih tertinggal dalam hal akses dan kualitas infrastruktur. Ketimpangan ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pentingnya infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan bahwa investasi yang berkelanjutan dan terencana di sektor ini harus menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani

anggaran negara. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Infrastruktur dan Peningkatan Investasi

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor utama yang mendorong daya tarik investasi di suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang baik memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan operasional bisnis, mulai dari akses transportasi, energi yang stabil, hingga sistem logistik yang efisien. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti pelabuhan Patimban dan kereta cepat Jakarta-Bandung, telah menunjukkan dampak positif terhadap minat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Laporan BKPM (2021) menyebutkan bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat distribusi barang tetapi juga menciptakan efisiensi biaya operasional bagi Perusahaan (Perdana dkk, 2023). Contohnya, pelabuhan Patimban dirancang untuk menjadi pusat logistik utama bagi sektor otomotif, yang akan menurunkan biaya ekspor kendaraan ke pasar global. Infrastruktur ini telah menarik minat investor asing, terutama dari Jepang, yang selama ini menjadi salah satu mitra utama dalam industri otomotif Indonesia.

Selain itu, Supriatna (2023) menyoroti pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan rel kereta api telah membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini memberikan peluang bagi investor untuk mengembangkan bisnis di daerah-daerah baru, khususnya di sektor manufaktur, logistik, dan pariwisata. Proyek jalan tol Trans-Sumatra, misalnya, telah menarik investasi baru di sektor perkebunan, industri olahan, dan pariwisata di wilayah Sumatra. Namun, meskipun pembangunan infrastruktur telah meningkatkan daya tarik investasi di beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan. Infrastruktur yang terpusat di wilayah barat Indonesia, terutama Pulau Jawa, membuat investasi lebih banyak terkonsentrasi di kawasan tersebut. Wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan, dan energi, yang menghambat masuknya investasi besar di wilayah tersebut. Ketimpangan infrastruktur ini memperkuat kesenjangan ekonomi antarwilayah, di mana wilayah yang memiliki infrastruktur lengkap cenderung lebih berkembang dibandingkan wilayah yang infrastrukturnya minim (Gozali & Ernawati, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga perlu mendorong investasi melalui skema insentif untuk investor yang bersedia mengembangkan bisnis di wilayah yang kurang berkembang. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) perlu ditingkatkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa terlalu membebani anggaran negara. Pemerintah dapat memberikan jaminan investasi atau insentif fiskal bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur di daerah-daerah

tertinggal. Dengan pendekatan ini, infrastruktur tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi Antarwilayah

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah (Banerjee dkk, 2020; Jiang dkk, 2011; Ma'rifah, 2022). Di negara dengan kondisi geografis yang kompleks seperti Indonesia, infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses pasar, dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil. Namun, meskipun investasi besar-besaran telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia. Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Pulau Jawa menyumbang lebih dari 50% PDB nasional karena memiliki jaringan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas energi yang lengkap. Sebaliknya, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih tertinggal dalam hal akses infrastruktur dasar. Keterbatasan ini menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan daya tarik investasi di wilayah tersebut, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi nasional.

Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan harga barang antara wilayah barat dan timur. Program Tol Laut, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga melalui peningkatan konektivitas maritim, telah memberikan dampak positif pada penurunan biaya distribusi barang di beberapa wilayah. Namun, efektivitas program ini masih terbatas karena pelabuhan di wilayah timur belum dilengkapi dengan fasilitas logistik modern. Selain itu, konektivitas darat yang terbatas di wilayah tersebut menghambat distribusi barang dari pelabuhan ke daerah pedalaman. Proyek jalan tol seperti Trans-Sumatra dan Trans-Jawa telah memperkuat konektivitas di Pulau Sumatra dan Jawa, yang berdampak positif pada percepatan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, proyek-proyek serupa di wilayah timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara, masih sangat minim. Misalnya, jalan Trans-Papua yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas di wilayah tersebut belum sepenuhnya selesai dan menghadapi tantangan geografis serta konflik sosial.

Selain infrastruktur transportasi, akses energi juga menjadi isu penting dalam pemerataan ekonomi. Wilayah timur Indonesia sering kali mengalami defisit listrik, yang menghambat aktivitas industri dan bisnis. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang digagas pemerintah bertujuan untuk memperbaiki situasi ini, tetapi realisasi proyek tersebut lebih banyak terfokus di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara daerah-daerah terpencil masih kurang mendapatkan perhatian. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan terarah. Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah:



- a. Fokus pada Infrastruktur Dasar di Wilayah Tertinggal: Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik di wilayah timur Indonesia untuk mendukung aktivitas ekonomi di sana.
- b. Integrasi Transportasi: Proyek infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi, mencakup konektivitas darat, laut, dan udara, agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lebih efisien.
- c. Insentif untuk Investasi di Wilayah Tertinggal: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor yang bersedia mengembangkan bisnis di wilayah yang infrastrukturnya kurang berkembang.
- d. Peningkatan Kapasitas Logistik: Modernisasi pelabuhan di wilayah timur, seperti pengadaan gudang logistik dan fasilitas bongkar muat yang efisien, perlu dipercepat untuk mendukung program Tol Laut.

Pemerataan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak positif bagi wilayah-wilayah tertinggal tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif secara nasional (Fahmi dkk, 2020). Dengan konektivitas yang lebih baik, potensi ekonomi dari seluruh wilayah Indonesia dapat dimaksimalkan, sehingga mengurangi kesenjangan dan menciptakan keseimbangan pembangunan yang lebih adil.

Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Indonesia, proses pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan pendanaan, hambatan regulasi, masalah pembebasan lahan, serta ketimpangan akses infrastruktur antarwilayah. Tantangan-tantangan ini menjadi penghambat utama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang efektif dan merata.

- a. Keterbatasan Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek infrastruktur berskala besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik, membutuhkan investasi yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2021), kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan mencapai Rp 6.445 triliun hingga tahun 2024. Namun, anggaran pemerintah hanya mampu menutupi sekitar 30% dari kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

Meskipun skema PPP telah berhasil menarik investor untuk beberapa proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya insentif yang menarik bagi investor dan risiko finansial yang tinggi. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi keuangan negara, sehingga alokasi

anggaran untuk infrastruktur cenderung mengalami tekanan sehingga, Simanjuntak, dkk (2022) mencatat bahwa pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi, yang mengakibatkan pengalihan dana dari proyek infrastruktur ke program pemulihan ekonomi nasional..

b. Hambatan Regulasi dan Perizinan

Regulasi yang kompleks dan proses perizinan yang memakan waktu menjadi salah satu penghambat utama pembangunan infrastruktur (Damoah & Kumi, 2018). Proses persetujuan proyek, khususnya dalam tahap awal, sering kali melibatkan banyak instansi pemerintah, yang menyebabkan keterlambatan realisasi proyek (Hu dkk, 2018). Misalnya, beberapa proyek jalan tol strategis sempat tertunda karena adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah telah mencoba menyederhanakan regulasi melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, implementasi kebijakan ini masih memerlukan waktu untuk mencapai efektivitas penuh.

c. Masalah Pembebasan Lahan

Adrianto, dkk (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masalah pembebasan lahan merupakan salah satu tantangan klasik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses pembebasan lahan sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat lokal karena harga ganti rugi yang dianggap tidak sesuai atau tidak transparan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pada proyek-proyek besar, seperti jalan tol Trans-Sumatra dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah dirancang untuk mengatasi masalah ini. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sistem kepemilikan tanah adat atau komunal.

d. Ketimpangan Akses Infrastruktur Antarwilayah

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia menjadi tantangan yang terus-menerus dihadapi. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi memiliki akses infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Di sisi lain, wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara masih tertinggal dalam hal akses jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik. Hal ini menghambat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan memperparah kesenjangan ekonomi nasional. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, proyek jalan Trans-Papua yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas di Papua masih menghadapi banyak kendala geografis dan sosial, yang menyebabkan progresnya lambat.

e. Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur, beberapa langkah strategis dapat diambil:

- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemerintah dapat mengembangkan skema pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi infrastruktur atau kemitraan bilateral dengan negara-negara mitra.
- Penyederhanaan Regulasi: Proses perizinan dan persetujuan proyek perlu disederhanakan lebih lanjut untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Pendekatan Sosial dalam Pembebasan Lahan: Pemerintah harus memastikan transparansi dan keadilan dalam proses ganti rugi lahan untuk menghindari konflik dengan masyarakat.
- Fokus pada Wilayah Tertinggal: Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Modernisasi Sistem Logistik: Fasilitas logistik seperti pelabuhan di wilayah tertinggal perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang.

D. Kesimpulan

Temuan-temuan penelitian dan diskusi yang disajikan di atas memungkinkan kami untuk menarik kesimpulan bahwa baik secara kolektif maupun individual tergantung pada variabel budaya organisasi seperti inovasi dan pengambilan risiko, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas / stabilitas, sesuai dengan temuan penelitian dan analisis yang disajikan di atas. Menurut hasil uji regresi, ketika nilai signifikan kurang dari 0,05, H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan di tempat lain dan menunjukkan bahwa budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, jelas bahwa budaya organisasi akan mengembangkan dedikasi dan konsistensi yang akan menginspirasi anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan kondisi lingkungan. Karena kinerja anggota individu, kinerja kelompok, dan bagaimana karyawan merasa memiliki perusahaan atau organisasi tidak mudah dipahami tanpa terlebih dahulu memahami budaya, keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau organisasi tergantung pada seberapa kuat atau lemah budaya organisasinya.

Penulis juga dapat memberikan umpan balik atau rekomendasi berdasarkan temuan diskusi dan kesimpulan yang dibahas di atas, seperti itu untuk meningkatkan pentingnya budaya organisasi karena menurut teori yang telah ditetapkan, budaya organisasi yang positif akan mengarah pada peningkatan kinerja karyawan. Meskipun dipertanyakan seberapa besar budaya perusahaan mempengaruhi kinerja bisnis. Namun, kinerja karyawan secara keseluruhan akan meningkat dengan meningkatnya budaya organisasi. Selain itu, dengan memberikan ringkasan pengaruh budaya

organisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya di PT. Takabonerate, penelitian ini diharapkan dapat membantu studi selanjutnya.

E. Daftar Pustaka

- Adrianto, H. J., Emirzon, J., Terhupeiory, A., & Nainggolan, B. (2023). Assessment professional functions in land procurement of national strategic projects in realizing legal certainty principle. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 926-932. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.329>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Laporan Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2020). On the road: access to transportation infrastructure and economic growth in china. *Journal of Development Economics*, 145, 102442. <https://doi.org/10.1016/j.jdevec0.2020.102442>
- Bank Dunia. (2021). *Indonesia Infrastructure Development*. Washington D.C.: World Bank.
- BKPM. (2021). *Laporan Investasi 2021: Infrastruktur Sebagai Daya Tarik Utama*. Jakarta: BKPM.
- Damoah, I. S. and Kumi, D. K. (2018). Causes of government construction projects failure in an emerging economy. *International Journal of Managing Projects in Business*, 11(3), 558-582. <https://doi.org/10.1108/ijmpb-04-2017-0042>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Farhan, M. and Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di pulau jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Gozali, A. and Ernawati, T. (2023). Peluang yang dapat diraih oleh desa patimban dari pembangunan pelabuhan patimban. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 65-74. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1963>
- Hermawan, H., Purnamayani, R., & Andrianyta, H. (2022). Pendekatan dan desain pengembangan kawasan kakao berbasis inovasi dan berdaya saing. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.52434/mja.v5i1.1803>
- Hu, Y., Le, Y., Gao, X., Li, Y., & Liu, M. (2018). Grasping institutional complexity in infrastructure mega-projects through the multi-level governance system: a case study of the hong kong-zhuhai-macao bridge construction. *Frontiers of Engineering Management*. <https://doi.org/10.15302/j-fem-2018074>
- IMF. (2020). *The Role of Infrastructure in Economic Growth*. Geneva: IMF.
- Izzatin, N. R., Durroh, B., & Masahid, M. (2023). Analisis daya saing ekspor kakao indonesia di pasar internasional. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 6(2), 337-349. <https://doi.org/10.37637/ab.v6i2.1266>
- Jiang, H., Chu, Z., & Wang, Q. (2011). Transport infrastructure and regional economic growth: evidence from china. *Transportation*, 38(5), 737-752. <https://doi.org/10.1007/s11116-011-9349-6>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). *Proyek Strategis Nasional: Laporan Kemajuan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kim, M., IkHaeng, L., & Jung, Y. (2017). International project risk management for nuclear power plant (npp) construction: featuring comparative analysis with fossil and gas power plants. *Sustainability*, 9(3), 469. <https://doi.org/10.3390/su9030469>
- Kurniawan, A. and Ihsan, M. (2021). Infrastruktur, investasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 78-88. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i2.15>
- McKinsey & Company. (2020). *Unlocking Indonesia's Infrastructure Potential*. New York: McKinsey Global Institute.
- Nurjati, E. (2022). Analisis daya saing ekspor jahe indonesia di pasar utama internasional periode tahun 2008-2018. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(1), 276-292. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.01.27>
- Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh dukungan pemerintah, infrastruktur, dan akses pasar terhadap pertumbuhan usaha kewirausahaan di wilayah perkotaan. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 149-161. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.121>
- Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, A., & Sutanto, B. (2021). "Analisis Peran Infrastruktur terhadap Produktivitas Nasional di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 45-56.
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahmah, M. dan Ibrahim, H. (2023). Strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 412-2417. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13281>
- Rahman, R., & Pratama, H. (2019). "Ketimpangan Infrastruktur dan Dampaknya pada Investasi Wilayah". *Jurnal Pembangunan Nasional*, 7(1), 23-34.
- Rashed, M. A., Alam, M. M., & Ibrahim, Y. (2017). Central public-private partnership (ppp) development facility for enhancing government obligation and efficiency in ppp project. *International Journal of Information Technology Project Management*, 8(4), 66-77. <https://doi.org/10.4018/ijitpm.2017100105>
- Simanjuntak, M., Sundari, S., & Hermawan, A. (2022). Composition of defense budget of the directorate general of defense potential republic of indonesia and its impact on the defense economy in covid-19 pandemic. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 7(2), 503. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v7i2.7846>
- Supriatna, H. (2023). Keterlambatan pembangunan jalan pada jalan akses pelabuhan patimban desa patimban kecamatan pusakanagara kabupaten subang jawa barat(pantura). *Sistem Infrastruktur Teknik Sipil (SIMTEKS)*, 3(2), 157. <https://doi.org/10.32897/simteks.v3i2.2816>
- Sutrisno, D., & Nugraha, F. (2020). "Percepatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 67-78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

A. Fadel Muhammad Et Al
Jurnal Interdisiplin (*JUNTER*) Vol . 1 No. 1 (2025)

JURNAL EKSOPODA

Journal of Interdisipliner

World Economic Forum. (2021). Global Competitiveness Report. Geneva: WEF.

Zainuddin, M., & Haryanto, T. (2020). "Peningkatan Infrastruktur sebagai Pendukung Investasi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 8(2), 56-68..



JUNTER

Jurnal Interdisipliner

Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2024).

First Publication Right :

© JUNTER : Jurnal Interdisiplin

This article is under:

